



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan *top down/bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja OPD Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Renja SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).
17. Perwal nomor 63 tahun 2020 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Amanat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD demi tercapainya tujuan bernegara. Kemudian Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 dalam rangka menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

1.4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang. Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 7 (tujuh) Walikota Yogyakarta.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- 2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
- 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. TUJUAN EVALUASI
- 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.2. RENJA PERUBAHAN
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2020

2.1. Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan dilakukannya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 antara lain untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

Sampai dengan Triwulan II ini, hasil Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 untuk BPKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD BPKAD Triwulan II Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
BPKAD	94,02	73,36	Sangat Tinggi	Sedang	Ketergantungan kinerja oleh kinerja OPD lain.	Program dilaksanakan sesuai tatakala.

Sumber: SIM Evaluasi Dalbang

Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan II Tahun 2020 bisa dilihat di Tabel 2.1 (terlampir).

Anggaran belanja di BPKAD sudah dilakukan tiga kali penyempurnaan, hal tersebut sebagai langkah penyesuaian adanya situasi luar biasa yang terjadi karena adanya pandemi covid 19. Penyangkapan pada evaluasi ini adalah realisasi fisik dan keuangan dibandingkan dengan anggaran penyempurnaan ketiga. Hal tersebut dilakukan mengingat anggaran penyempurnaan ketiga adalah anggaran yang secara resmi digunakan pada

saat berakhirnya semester I. Secara detail penjelasan perkegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi realisasi fisik tercapai 28,98% dan keuangan tercapai 46,29%. Anggaran rapat dan perjalanan dinas yang belum dilakukan sampai dengan tanggal 21 April akan dihapus atau dikurangi untuk kemudian dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19.
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi fisik tercapai 99,33% dan keuangan tercapai 91,01%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor belum ada realisasi fisik dan keuangan, semula perbaikan gedung akan dilakukan pada triwulan III.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 58,96%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 99,59%.
4. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
Perencanaan Anggaran realisasi fisik tercapai 86,15% dan keuangan tercapai 87,94%.
Pengendalian Anggaran realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 98,42%.
5. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
Pengendalian Belanja Daerah realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 99,13%.
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer realisasi fisik tercapai 99,98% dan keuangan tercapai 98,37%.
6. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD realisasi fisik tercapai 94,61% dan keuangan tercapai 88,21%.
Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD realisasi fisik tercapai 92,92% dan keuangan tercapai 67,52%.
7. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

Pelayanan Pajak Daerah realisasi fisik tercapai 300,46% dan keuangan tercapai 99,09%. Capaian fisik lebih dari seratus persen karena banyaknya permohonan pengurangan PBB yang diterima.

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah realisasi fisik tercapai 64,19% dan keuangan tercapai 99,49%

Penetapan Pajak Daerah realisasi fisik tercapai 372,90% dan keuangan tercapai 99,39%. Capaian fisik lebih dari seratus persen karena banyaknya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang selesai.

8. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah

Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah realisasi fisik tercapai 40,69% dan keuangan tercapai 16,34%.

Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah realisasi fisik tercapai 119,89% dan keuangan tercapai 95,30%.

9. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset

Perencanaan Pengadaan dan Distribusi Aset realisasi fisik tercapai 48,11% dan keuangan tercapai 99,96%.

Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 33,22%.

Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan realisasi fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 49,50%.

Atas instruksi Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Yogyakarta semua belanja yang belum dilakukan sampai dengan tanggal 21 April 2020 akan dihapus/dikurangi untuk kemudian dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19.

Lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 2.1

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,63 %
2	Pendapatan pajak daerah meningkat	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	59 %
		Nilai Pajak Daerah	451106500000 Rp
3	Pendapatan pajak daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	451.106.500.000 Rp

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan/ sesuai kebutuhan / Jumlah kegiatan x 100%	100,00 %	7.434.837.628,00	92,87 %	6.752.213.249,00	100,00 %	6.312.100.231,00	50 %	3.233.302.178,00	91,60 %	2.761.740.865,90	183,20%	85,42%							Sekretariat	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				289.980.000,00		175.525.000,00		18.500.000,00	70,14%	18.500.000,00	53,46%	8.923.570,00	76,22%	48,24%								
			Rapat koordinasi yang terselenggara		115 kali		82 kali		20 kali		60,00%		60,00%		100,00%									
			Laporan perjalanan dinas		19 Laporan		15 Laporan		4 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%									
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.144.857.628,00		6.576.688.249,00		6.293.600.231,00	49,44%	3.214.802.178,00	49,45%	2.752.817.295,90	100,03%	85,63%								
			Jasa tenaga bantuan		0 orang		5 orang		5 orang		49,98%		50,00%		100,04%									
			Alat tulis kantor yang tersedia		107 jenis		107 jenis		101 jenis		31,80%		22,55%		70,91%									
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		10 jenis		10 jenis		10 jenis		60,00%		60,00%		100,00%									
			Perangko yang tersedia		17.760 buah		31.500 buah		35.000 buah		49,98%		50,00%		100,04%									
			Materai @6000 yang tersedia		600 buah		350 buah		300 buah		85,71%		66,67%		77,79%									
			Materai @3000 yang tersedia		2.500 buah		1.600 buah		500 buah		49,98%		70,00%		140,06%									
			Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia		2 jenis		0 jenis		2 jenis		47,83%		62,50%		130,67%									
			Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia		30 jenis		32 jenis		30 jenis		56,67%		52,94%		93,42%									
			Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi		1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa kebutuhan air yang tersedia		36 SKPD		36 SKPD		36 SKPD		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa pembayaran Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%		100,04%									
			Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa KIR kendaraan dinas/operasional		3 unit		2 unit		2 unit		50,00%		0,00%		0,00%									
			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya		66 unit		66 unit		58 unit		50,00%		56,90%		113,80%									
			Jasa percetakan		4 jenis		4 jenis		6 jenis		50,00%		75,00%		150,00%									
			Jasa penggandaan		270.000 lembar		270.000 lembar		275.146 lembar		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumaha tangaan		7 jenis		5 jenis		5 jenis		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa kebersihan kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%		100,04%									
			Sarana dan prasarana kantor yang tersedia		12 jenis		12 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									

Rata-rata capaian kinerja															88,12%	66,93%					
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/kebutuhanJumlah kegiatan X 100%	100,00 %	463.174.041,00	85,47 %	355.470.187,00	100,00 %	201.858.780,00	50 %	104.443.910,00	58,76 %	48.192.287,00	117,52%	46,14%					Sekretariat
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung			120.133.341,00		154.858.000,00		80.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara			343.040.700,00		200.612.187,00		121.858.780,00	49,98%	104.443.910,00	49,98%	48.192.287,00	100,00%	46,14%					
			Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara			52 unit		52 unit		48 unit	49,98%		50,00%		100,04%						
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	23,07%					
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusunlancar sesuai kebutuhan / Jumlah output kegiatan yang direncanakan x100%	100,00 %	16.511.500,00	99,94 %	12.816.950,00	100,00 %	734.000,00	50 %	734.000,00	99,59 %	731.000,00	199,18%	99,59%					sekretariat
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja			16.511.500,00		12.816.950,00		734.000,00	100,00%	734.000,00	100,00%	731.000,00	100,00%	99,59%					
			Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah			6 dokumen		6 dokumen		6 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,59%					
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	100,00 %	144.435.080,00	100,00 %	109.274.493,00	100,00 %	59.796.180,00	100 %	38.956.310,00	100 %	38.672.408,00	100,00%	99,27%					Bidang Anggaran
		1 Perencanaan Anggaran				144.435.080,00		109.274.493,00		47.982.780,00	59,73%	27.142.910,00	59,73%	26.881.308,00	100,00%	99,04%					
			Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	80,00%		80,00%		100,00%						
			Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	5,00%		5,00%		100,00%						
			Dokumen KUA-PPAS TA 2021			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%						
			Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021			3 dokumen		3 dokumen		2 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%						
			Dokumen KUPA-PPAS TA 2020			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%						

		Dokumen penyempurnaan Perwal tentang penjabaran APBD TA.2020	3 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPD TA.2021	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%											
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%											
	2 Pengendalian Anggaran			0,00	0,00	11.813.400,00	92,11%	11.813.400,00	95,67%	11.791.100,00	103,86%	99,81%							
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	95,00%	100,00%	105,26%											
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPD TA. 2020	44 skpd	44 skpd	44 skpd	0,00%	0,00%	0,00%											
		Pencairan dana Bantuan	42 skpd	42 skpd	10 skpd	85,00%	85,00%	100,00%											
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	90,00%	90,00%	100,00%											
Rata-rata capaian kinerja												101,93%	99,42%						
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	92,90 %	122.202.617,00	89,79 %	53.757.400,00	92,70 %	78.908.758,00	92,70 %	38.654.017,00	89,79 %	38.392.396,00	96,86%	99,32%	Bidang
	1 Pengendalian Belanja Daerah				88.491.417,00		42.001.400,00		21.658.200,00	71,36%	15.958.200,00	71,36%	15.861.200,00	100,00%	99,39%	
		Pengendalian Belanja Daerah		44 OPD		44 OPD	44 OPD			60,03%		60,03%		100,00%		
		Penyelesaian TPTGR		6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		
		Pembuatan/Penyusunan Form 1721 A2 PPh Pasal 21 atas Gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 Pejabat Negara guna Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2019 dan Persiapan Penyusunan Form 1721 A2 Tahun 2020		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen			100,00%		100,00%		100,00%		
		Pencermatan Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			60,00%		60,00%		100,00%		
		Pembayaran PFK		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		
		Penerbitan SKPP		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			60,03%		60,03%		100,00%		
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah		44 OPD		44 OPD	44 OPD			60,03%		60,03%		100,00%		
	2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer				33.711.200,00		11.756.000,00		57.250.558,00	49,98%	22.695.817,00	49,97%	22.531.196,00	99,98%	99,27%	
		Laporan DAK ke Walikota		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			49,98%		49,98%		100,00%		
		Laporan DAK ke pusat		4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		
		Laporan DAU		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			50,00%		49,98%		99,96%		
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer / Laporan Realisasi Transfer		4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian		12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen			50,00%		49,98%		99,96%		
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		
		Laporan Perbendaharaan		6 dokumen		6 dokumen	12 dokumen			50,00%		49,98%		99,96%		
		Laporan Dana Insentif		2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen			50,00%		50,00%		100,00%		

Rata-rata capaian kinerja														99,99%	99,33%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	86,35 %	398.921.417,00	120,00 %	298.250.516,00	81,81 %	242.942.141,00	81,81 %	192.192.141,00	92,51 %	163.710.541,00	113,08%	85,18%					Bidang
		1 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				398.921.417,00		298.250.516,00		195.737.141,00	85,11%	160.037.141,00	85,11%	145.380.541,00	100,00%	90,84%					
			Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%						
			Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%						
			Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%						
			Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		90,00%		90,00%		100,00%						
			Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		75,00%		75,00%		100,00%						
			Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribunal IV dan TA. 2020 Tribunal I , II , III		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%						
			SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual		45 SKPD,		45 SKPD,		45 SKPD,		86,67%		86,67%		100,00%						
			Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
			Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
			Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual		45 SKPD,		45 SKPD,		45 SKPD,		86,67%		86,67%		100,00%						
		2 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD				0,00		0,00		47.205.000,00	99,99%	32.155.000,00	99,99%	18.330.000,00	100,00%	57,01%					
			Evaluasi Investasi Dana Daerah		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Laporan Bulanan Realisasi Penyerahan Modal		0 dokumen		0 dokumen		24 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan		0 BLUD		0 BLUD		23 BLUD		100,00%		100,00%		100,00%						
			Kajian analisis investasi pada BUMD		0 BLUD		0 BLUD		0 BLUD		0,00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	73,92%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang						

Pendapatan pajak daerah meningkat	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target pajak daerah	jumlah capaian persentase masing-masing item pajak dibagi jumlah item pajak	100,00 %	780.079.475,00	102,70 %	705.567.918,00	100,00 %	812.111.443,00	100 %	250.077.670,00	102,70 %	249.241.679,00	102,70%	99,67%					Bidang Pajak							
	1 Pelayanan Pajak Daerah				280.122.475,00		287.865.295,00		449.732.448,00	54,57%	185.775.010,00	60,54%	185.250.426,00	110,94%	99,72%												
		Pemohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani		2.400 berkas		2.700 berkas	2.400 berkas			36,46%		22,54%		61,82%													
		Pelaporan SPTPD yang terlayani		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD	22.000 SPTPD			45,45%		56,91%		125,21%													
		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2		100 Objek		100 Objek	0 Objek			0,00%		0,00%		0,00%													
		Pemohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani		2.400 berkas		3.900 berkas	8.300 berkas			83,13%		100,00%		120,29%													
	2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah				144.160.000,00		135.187.931,00		95.648.345,00	34,72%	26.063.635,00	27,29%	25.973.473,00	78,60%	99,65%												
		Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD	15.000 SPTPD			50,70%		57,05%		112,52%													
		Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)		60 WP		140 WP	110 WP			50,00%		65,45%		130,90%													
		Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru		350 WP		300 WP	220 WP			68,20%		74,09%		108,64%													
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)		5.500 objek		5.650 objek	5.500 objek			16,40%		0,16%		0,98%													
	3 Penetapan Pajak Daerah				355.797.000,00		282.514.692,00		266.730.650,00	90,43%	38.239.025,00	91,08%	38.017.780,00	100,72%	99,42%												
		Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap		100 WP		48 WP	18 WP			66,67%		100,00%		149,99%													
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap		100 WP		48 WP	18 WP			66,67%		94,44%		141,65%													
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana		35 WP		30 WP	0 WP			0,00%		0,00%		0,00%													
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu		12 WP		12 WP	5 WP			100,00%		80,00%		80,00%													
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)		94.250 SPPT		94.336 SPPT	95.000 SPPT			98,95%		88,88%		89,82%													
Rata-rata capaian kinerja																					96,75%	99,60%					
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Pendapatan pajak daerah meningkat	Program Pembukaan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	Jumlah tunggakan pajak daerah terbayar dibagi jumlah seluruh tunggakan pajak daerah	16,00 %	2.228.711.000,00	23,71 %	2.137.641.000,00	15,00 %	152.389.780,00	15 %	137.724.910,00	98,43 %	135.629.926,40	656,20%	98,48%					Bidang
	1 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah				330.035.000,00		328.401.000,00		147.984.780,00	90,16%	133.319.910,00	94,28%	131.224.926,40	104,57%	98,43%					
		Tunggakan pajak daerah yang ditagih		1.000 ketentuan		1.000 ketentuan	250 ketentuan			49,98%		67,20%		134,45%						
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah		1.000 berkas		1.000 berkas	5.000 berkas			49,98%		100,00%		200,08%						
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang ditagih		15.000 SPPT		15.000 SPPT	7.500 SPPT			100,00%		100,00%		100,00%						
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan		500 WP		500 WP	185 WP			100,00%		100,00%		100,00%						

			Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan	1.500 WP	600 WP	706 WP		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah		1.898.676.000,00	1.809.240.000,00	4.405.000,00	56,44%	4.405.000,00	73,45%	4.405.000,00	130,14%	100,00%							
			Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikasi	2.250 WP	2.250 WP	450 WP		100,00%		100,00%		100,00%							
			Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	500 WP	500 WP	58 WP		28,00%		100,00%		357,14%							
			Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%							
			Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%							
			Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	500 WP	500 WP	0 WP		0,00%		0,00%		0,00%							
			Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) , Benda Cagar Budaya (BCB) dan Benda Warisan Budaya (BWB)	225 WP	225 WP	0 WP		0,00%		0,00%		0,00%							
			Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	30 WP	0 WP		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja												117,36%	99,21%						
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%	100,00 %	4.709.745.000,00	96,95 %	12.725.536.759,00	96,00 %	430.857.840,00	96 %	313.753.430,00	96,95 %	270.413.664,00	100,99%	86,19%			Bidang Aset
		1	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset			1.887.613.700,00		10.376.192.162,00		220.963.780,00	95,30%	206.298.910,00	95,30%	206.218.748,00	100,00%	99,96%			
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)		10 dokumen		10 dokumen		0 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%				
			Pengadaan Barang Daerah		9 Jenis		9 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
		2	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset			2.527.322.800,00		2.217.637.905,00		158.011.280,00	66,46%	81.011.610,00	66,46%	37.752.008,00	100,00%	46,60%			
			Deductible klaim asuransi		1 tahun		1 tahun		1 tahun		85,00%		85,00%		100,00%				
			Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah		1 premi		1 premi		0 premi		0,00%		0,00%		0,00%				
			Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta		1 premi		1 premi		0 premi		0,00%		0,00%		0,00%				
			Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta		3 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%				
			Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah		1 kasus		2 kasus		1 kasus		45,45%		45,45%		100,00%				
			Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal		3 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%				
		3	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan			294.808.500,00		131.706.692,00		51.882.780,00	49,95%	26.442.910,00	49,95%	26.442.908,00	100,00%	100,00%			
			Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta		4 bangunan		10 bangunan		2 bangunan		70,00%		70,00%		100,00%				
			Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset		52 SKPD		44 SKPD		44 SKPD		50,00%		50,00%		100,00%				
			Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%				

	Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	52 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	65,00%	65,00%	100,00%											
	Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	2 kali	2 kali	45,00%	45,00%	100,00%											
	Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
	Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	18 unit	23 unit	0 unit	100,00%	100,00%	100,00%											
	Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi	1 lokasi	0 lokasi	100,00%	100,00%	100,00%											
Rata-rata capaian kinerja							100,00%	82,19%										
Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Tinggi										
Total anggaran dari seluruh program					8.291.699.153,00	4.309.838.566,00	3.706.724.767,30											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)							95,00%	86,01%										
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)							Sangat Tinggi	Tinggi										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan sehingga dilakukan analisis penyiapan belanja yang kurang prioritas untuk dilakukan rasionalisasi pada APBD-P																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mohon percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan proses pelaksanaan administrasi keuangan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan di TA 2020 lebih cermat dan detail																	

Yogyakarta,

2020

Yogyakarta,

2020

Disusun oleh
Kepala DPPKADDievaluasi oleh
BAPPEDAWasesa, SH
NIP. 196405061993031009Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester I dan dengan mempertimbangkan adanya situasi luar biasa adanya pandemi Covid 19 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran TA 2020 dengan rincian seperti pada tabel 3.1.

Pengurangan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	7,178,495,796	5,783,488,231	
4.07.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	109 kali	12 kali	245,700,000	12,900,000	SPPD dikurangi Rp232.800.000,- dan disisakan Rp12.900.000,- karena sudah direalisasikan, dan antisipasi perjalanan dinas satu kali untuk koordinasi.
		Laporan perjalanan dinas	42 laporan	3 laporan			
4.07.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang	6,932,795,796	5,770,588,231	Pengurangan Rp1.162.207.565 pada ATK, alat listrik, perangk, BBM bahan komputer, peralatan rumah tangga, bahan percontohan, plakat, telepon, air, listrik, kirim dokumen, fumigasi, belanja modal, dll. penambahan pada biaya STNK dan pemeliharaan bangunan.
		Alat tulis kantor yang tersedia	104 jenis	102 jenis			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Perangko yang tersedia	30.500 buah	27.600 buah			
		Materai @6000 yang tersedia	350 buah	300 buah			
		Materai @3000 yang tersedia	1.200 buah	500 buah			
		Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis	33 jenis			
		Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD	1 SKPD			
		Jasa kebutuhan air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD			
		Jasa pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 unit	2 unit			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	59 unit	66 unit			
		Jasa percetakan	6 jenis	5 jenis			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa penggandaan	354.000 lembar	150.146 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	5 jenis	4 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 jenis	1 jenis			
4.07.01.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	438,638,280	109,358,780	
4.07.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 jenis	0 jenis	199,000,000	0	Dinolkan dengan mengurangi belanja taman Rp 2juta, dan renovasi bangunan Rp 197juta.
4.07.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	11 unit	10 unit	239,638,280	109,358,780	Pengurangan sebesar 130.279.500 pada service kendaraan, suku cadang, eksploitasi kendaraan dan BBM.
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	48 unit	51 unit			
4.07.01.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelatihan/diklat keuangan	0 orang	0 orang	0	0	Diampu BKPP
4.07.01.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	12,357,000	734,000	
4.07.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, Perjanjian kinerja	8 dokumen	8 dokumen	12,357,000	734,000	Pengurangan sebesar Rp11.623.000 pada cetak, penggandaan, dan makan minum rapat.
		Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan fisik dan keuangan, SPIP, IKM, dokumen profil SKPD, dokumen profil keuangan daerah	6 dokumen	6 dokumen			
4.07.01.122	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	151,915,780	109,796,180	
4.07.01.122.001	Perencanaan Anggaran	Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen	122,865,780	97,982,780	Pengurangan sebesar Rp24.883.000 pada cetak, penggandaan dan makan minum rapat.
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	2 dokumen	2 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen penyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	4 dokumen			
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Naskah Akademik Perda P3KD	0 dokumen	1 dokumen			
4.07.01.122.002	Pengendalian Anggaran	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD	29,050,000	11,813,400	Pengurangan sebesar Rp17.236.600,- pada penggandaan dan makan minum rapat.
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	44 SKPD			
		Pencairan dana Bantuan	20 SKPD	20 SKPD			
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen			
4.07.01.123	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer	Persentase penyerapan belanja daerah	92,7%	88%	123,250,558	78,908,758	
4.07.01.123.001	Pengendalian Belanja Daerah	SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah	44 SKPD	44 SKPD	60,754,000	21,658,200	Pengurangan sebesar Rp39.095.800 pada honor tim, penggandaan, makan minum rapat, jasa tenaga ahli, dan jasa narasumber.
		Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	6 dokumen	6 dokumen			
		Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2019 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji	12 dokumen	12 dokumen			
		Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 4% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,96% iuran Pemda kepada PT. TASPEN	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan SKPP yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen			
		Cakupan SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	44 SKPD	44 SKPD			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.123.002	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	62,496,558	57,250,558	Berkurang Rp5.246.000 pada makan minum rapat
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer / Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Perbendaharaan	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Dana Insentif	2 dokumen	2 dokumen			
4.07.01.124	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	81,81%	93%	430,088,000	244,400,600	
4.07.01.124.001	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen	322,090,000	197,195,600	Pengurangan sebesar Rp124.894.400 pada cetak, penggandaan, jasa narasumber, transport narasumber dan akomodasi narasumber.
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	4 dokumen			
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	2 kali			
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			
4.07.01.124.002	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Evaluasi Investasi Dana Daerah	30 kali	10 kali	107,998,000	47,205,000	Pengurangan sebesar Rp60.793.000 pada honor tim, penggandaan, rapat, tenaga ahli dan narasumber.
		Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	24 dokumen	24 dokumen			
		Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	12 dokumen	12 dokumen			
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD	23 BLUD			
		Kajian analisis investasi pada BUMD	0	0			
4.07.01.125	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah	100%	100%	927,737,878	803,126,789	
4.07.01.125.001	Pelayanan Pajak Daerah	Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	3300 berkas	13.000 berkas	469,507,448	449,207,794	Pengurangan sebesar Rp 20.299.654 pada anggaran honor tenaga teknis dan makan minum rapat.
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	2.300 berkas			
		Pelaporan SPTPD yang terlayani	22.000 SPTPD	25.000 SPTPD			
		Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek pajak	0 Objek pajak			
4.07.01.125.002	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	15.000 SPTPD	174,824,780	87,398,345	Pengurangan sebesar Rp87.426.435 pada anggaran bahan percontohan, tenaga teknis, makan minum rapat, dan transport peserta.
		Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP	110 WP			
		Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP	220 WP			
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.500 objek PBB-P2	4.675 objek PBB-P2			
4.07.01.125.003	Penetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP	25 WP	283,405,650	266,520,650	Pengurangan sebesar Rp16.885.000 pada anggaran makan minum rapat.

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP	25 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	5 WP			
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2	95.000 SPPT PBB-P2			
4.07.01.126	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	15%	14,5%	3,425,601,030	325,089,780	
4.07.01.126.001	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah yang ditagih	1.000 ketetapan	250 ketetapan	691,429,780	320,684,780	Pengurangan sebesar Rp 370.745.000 pada honor tim, jasa media masa, dokumentasi, sewa meja kursi, makan minum rapat, dan transport peserta.
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1.000 berkas	10.000 berkas			
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang ditagih	12.000 SPPT	7.500 SPPT			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan	550 WP	185 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan	960 WP	706 WP			
4.07.01.126.002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikasi	2000 WP	450 WP	2,734,171,250	4,405,000	Pengurangan sebesar Rp 2.729.766.250 pada plakat, dokumentasi, sewa meja, makan minum rapat, makan minum tamu, serta Kompensasi WP BCB dan kompensasi WP pajak hotel dan pajak restoran ditiadakan.
		Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	500 WP	28 WP			
		Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	25 dokumen			
		Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan	12 dokumen	12 dokumen			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	500 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) , Benda Cagar Budaya (BCB) dan Benda Warisan Budaya (BWB)	225 WP	0 WP			
		Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	0 WP			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.07.01.127	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	96%	94%	3,854,678,534	1,977,042,540	
4.07.01.127.001	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	10 dokumen	0 dokumen	629,725,200	1,638,323,280	Bertambah sebesar Rp 1.008.598.080 karena penambahan untuk belanja kendaraan dan naskah akademik untuk peraturan barang daerah, serta ada pengurangan untuk tenaga teknis, cetak, penggandaan, dan makan minum rapat.
		Pengadaan Barang Daerah	14 jenis	4 jenis			
		Dokumen Naskah Akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan BMD	0 dokumen	1 dokumen			
4.07.01.127.002	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Deductible klaim asuransi	1 tahun	1 tahun	2,811,111,554	234,211,280	Pengurangan sebesar Rp 2.576.900.274 untuk tenaga teknis, premi Asuransi gedung milik pemkot dan asuransi kendaraan, service, suku cadang dan BBM kendaraan hasil tarikan, makan minum rapat, jasa konsultasi, dan kompensasi pemanfaatan aset.
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah	3 premi	0 premi			
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi	1 premi			
		Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit	3 unit			
		Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	2 kasus			
		Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	3 dokumen			
4.07.01.127.003	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan	2 bangunan	413,841,780	104,507,980	Pengurangan sebesar Rp 309.333.800 pada jasa pengumuman lelang, dokumentasi, tenaga teknis, penggandaan, makan minum rapat, jasa instruktur, transport peserta, BM papan informasi, BM pagar, meskipun ada penambahan pada belanja cetak.
		Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	2 kali			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit	6 unit			
		Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi	0 lokasi			
Total					16,542,762,856	9,431,945,658	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

A. Kebutuhan anggaran

Kebutuhan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang efisien, efektif transparan akuntabel dan rasional.

Apabila ada kebijakan maka tambahan anggaran akan menyesuaikan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

C. Rencana lanjutan

Rencana selanjutnya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD dari Tahun 2017 sampai 2022.

Pengusulan Perubahan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2020 sesuai kebutuhan yang telah direncanakan tahun 2020 dan Perubahan Anggaran pada perencanaan tahun 2020 ini sebesar Rp 9,431,945,658. Untuk mencapai program yang ada sesuai dengan fungsi dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga pelaksanaan sesuai tatakala yang sudah direncanakan dan anggaran yang diusulkan telah dirasionalkan sesuai kebutuhan. Dengan demikian kebutuhan anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan telah dirasional. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun ini selain merupakan jabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.